



**ORASI WISUDA KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
PADA WISUDA KE-68  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
SELASA, 04 OKTOBER 2016**

**PENTINGNYA INKLUSI KEUANGAN DALAM MENDORONG  
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN  
PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT**

Oleh : Muliaman D. Hadad, Ph.D.

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Selamat Pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang kami hormati, Para Pimpinan Universitas Tarumanagara**

**Para Dekan dan Dosen Universitas Tarumanagara**

**Para Lulusan serta Bapak/Ibu hadirin sekalian yang berbahagia**

Mengawali orasi ilmiah ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karuniaNya kita telah diberikan kesempatan untuk dapat hadir pada pagi hari ini pada acara Sidang Terbuka Senat dan Wisuda ke-68 Universitas Tarumanagara.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Tarumanagara, atas undangannya untuk memberikan orasi ilmiah pada acara yang penting ini. Tema yang akan saya angkat adalah : Pentingnya Financial Inclusion untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Tema ini tentunya sangat relevan bagi saya sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, maupun saya sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Apalagi *World Bank* pada akhir tahun lalu menyampaikan kepada Presiden dan Jajarannya bahwa Indonesia perlu memberikan perhatian besar pada tingkat gini rasio Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Gini Rasio adalah indeks rasio yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan kelompok masyarakat.

Selain itu, baru baru ini Queen Maxima yang merupakan Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB tentang inklusi keuangan untuk pembangunan (UNSGSA) juga telah menyampaikan kepada Presiden dan jajarannya tentang begitu pentingnya peningkatan financial inclusion bagi Indonesia.

**Bapak Ibu hadirin dan para lulusan yang berbahagia,**

Sejak dua tahun terakhir ini perekonomian kita mengalami tekanan yang cukup signifikan, terutama dari jatuhnya harga komoditas dunia dan melemahnya ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama kita. Namun patut kita syukuri, kita dapat menutup tahun 2015 dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik yaitu sebesar 4,79%, relatif lebih baik dari beberapa *emerging market* lainnya seperti Turki, Afrika Selatan dan Brazil. Dan bahkan, pada Semester I tahun 2016 ini kita telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi yaitu sebesar 5,18%.

Ini memang berita baik, yang menggambarkan ekonomi nasional mulai menunjukkan geliatnya. Berbagai kebijakan yang diluncurkan pemerintah dan otoritas keuangan-lainnya, baik Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia telah memperlihatkan hasilnya.

Pertanyaannya adalah "apakah ini sudah cukup baik bagi negara kita?" Saya merasa ini tidak cukup dan kita tidak boleh berpuas diri. Indonesia saat ini memang sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia. Namun kita sepertinya struggling untuk memanfaatkan kebesaran yang kita miliki ini. Hal ini dilihat dari PDB Per Kapita Indonesia yang masih tertinggal di peringkat 102 Dunia masih tergolong dalam "lower middle income economy" sedangkan negara tetangga kita, seperti Malaysia menduduki peringkat ke 47 dan Thailand peringkat ke 76 dunia. Kita masih tertinggal jauh dibandingkan mereka.

Belum lagi apabila kita melihat tren tingkat pengangguran dan kemiskinan yang belum juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Berdasarkan data dari BPS, tingkat pengangguran kita pada Triwulan I tahun 2016 mencapai 5,50%, tidak banyak perbaikan dibandingkan akhir tahun 2014 yang sebesar 5,94%. Tingkat kemiskinan kita juga menggambarkan tren yang serupa, pada Triwulan I 2016 mencapai 10,86%, tidak banyak mengalami penurunan dibandingkan akhir tahun 2014 yang sebesar 10,96%. Selain itu, tingkat kesenjangan atau gini ratio dalam lima tahun terakhir juga masih belum menunjukkan perbaikan dan bahkan cenderung melebar. Pada Triwulan I tahun 2016 tercatat sebesar 0,397 sedangkan pada akhir tahun 2010 tercatat sebesar 0,378.

Oleh karena itu, ternyata kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih merata dari apa yang telah kita capai saat ini untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta untuk menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat.

Ini adalah pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian dan kerja keras kita semua. Termasuk adik-adik mahasiswa yang diwisuda pada hari ini. Bagaimana kita bisa menciptakan terobosan-terobosan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

### **Bapak Ibu hadirin dan para lulusan yang berbahagia,**

Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, salah satu faktor utama adalah tingkat inklusi keuangan yang memadai. Tanpa didukung tingkat inklusi keuangan yang memadai, akan sulit kita mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini disampaikan dalam publikasi oleh *World Economic Forum* yaitu *The Inclusive Growth and Development Report 2015*.

Lalu, apa itu inklusi keuangan atau yang biasa disebut dengan *financial inclusion*. *The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)* mendefinisikan finansial inclusion adalah suatu kondisi dimana seluruh rumah tangga dan usaha, terlepas dari tingkat pendapatannya, memiliki akses dan efektif dapat menggunakan layanan keuangan yang tepat sesuai kebutuhan mereka.

Berdasarkan penelitiannya yang dipublikasi pada *Focus Note CGAP* di April 2014 menyimpulkan hal yang sama bahwa pasar keuangan yang inklusif dan efisien akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi biaya transaksi, memacu aktivitas ekonomi, dan meningkatkan penyediaan manfaat sosial lainnya.

Oleh karena itu, banyak negara menempatkan agenda peningkatan financial inclusion masyarakat ini menjadi prioritas utama. Berawal dari Pertemuan G20 Pittsburgh Summit tahun 2009 yang mengusung *financial inclusion* menjadi salah satu pillar dalam prioritas pembangunan, saat ini telah lebih dari 50 negara telah memiliki strategi inklusi keuangan dalam mendukung strategi pembangunan mereka.

Strategi peningkatan inklusi keuangan melalui berbagai program melek keuangan dan penyediaan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat luas telah terbukti akan dapat mendorong upaya penurunan tingkat kemiskinan dan mempersempit ketimpangan.

Upaya ini menjadi lebih penting lagi karena berdasarkan penelitian *World Bank* yang di publikasi tahun lalu yang berjudul *The Little Data Book On Financial Inclusion 2015*, menyatakan bahwa sekitar 38% penduduk dewasa di dunia ternyata masih belum memiliki akses keuangan di lembaga keuangan formal.

## **Bapak Ibu hadirin dan para lulusan yang berbahagia,**

Kemudian, bagaimana dengan tingkat inklusi keuangan di Indonesia?. Berdasarkan publikasi *World Bank* tersebut, tingkat inklusi keuangan kita malah masih jauh tertinggal dibandingkan rata-rata global. Masih ada sekitar 64% penduduk dewasa di atas 15 tahun yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal atau baru 36% yang telah memiliki akses keuangan. Kondisi ini lebih buruk dibandingkan Thailand, Malaysia dan Singapura yang telah memiliki tingkat inklusi keuangan lebih dari 75%. Indonesia bahkan merupakan negara ketiga terbesar penyumbang "unbanked people" di dunia, setelah China dan India. Ini merupakan fakta yang ironis dan membutuhkan perhatian lebih dari kita semua.

Terbatasnya akses keuangan formal bagi masyarakat atau UMKM kita untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun modal kerja, saat ini banyak dimanfaatkan oleh para Rentenir dengan menyediakan dana yang memiliki tingkat bunga yang sangat tinggi. Kondisi inilah yang menjerat mereka makin dalam pada jurang kemiskinan.

Menyikapi hal ini, Saya akan menyampaikan tiga tantangan terbesar dalam meningkatkan inklusi keuangan kita:

- Pertama, adalah kondisi geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang hampir mencapai 17.000 pulau dan mayoritas masyarakat miskin tinggal di lokasi yang terpencil. Kondisi geografis ini menyebabkan ketersediaan jaringan lembaga keuangan menjadi terbatas dan tidak merata, akses terhadap informasi juga menjadi terbatas. Menyediakan kantor fisik dan edukasi keuangan bagi masyarakat di remote area menjadi mahal. Lembaga keuangan akan lebih cenderung membuka kantor pelayanan di daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan enggan membuka di wilayah yang kurang memiliki potensi ekonomi.
- Kedua, kurangnya melek keuangan (literasi keuangan) masyarakat atau pemahaman mereka pada produk/ layanan keuangan. Berdasarkan survey yang kami lakukan di tahun 2013, lebih dari 75% masyarakat kita memiliki pemahaman yang kurang tentang keuangan. Ini merupakan fakta yang kurang menguntungkan bagi upaya peningkatan inklusi keuangan kita.
- dan Ketiga, adalah tidak tersedianya agunan. Ternyata banyak masyarakat belum memiliki dokumen atau sertifikat dari aset yang dimilikinya, khususnya masyarakat kecil ataupun usaha mikro dan kecil. Sedangkan sebagian besar lembaga keuangan akan mensyaratkan ketersediaan dokumen kepemilikan agunan dalam rangka manajemen risiko mereka.

Kondisi yang saya sampaikan tadi menjadikan lebih sulit lagi mewujudkan cita-cita kita bersama untuk meningkatkan *financial inclusion* bagi masyarakat luas.

## **Bapak Ibu hadirin dan para lulusan yang berbahagia,**

Pentingnya inklusi keuangan masyarakat ini telah disadari oleh Pemerintah dan Otoritas Keuangan terkait lainnya. Upaya dalam meningkatkan keuangan inklusif sudah menjadi prioritas nasional sejak 2012 dengan diluncurkannya dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). SNKI ini kemudian dilengkapi dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif saat ini telah mengalami penyempurnaan dan baru saja telah terbit Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada bulan Agustus tahun 2016 lalu.

Dalam SNKI ini mendefinisikan Inklusi Keuangan sebagai suatu kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menunjukkan komitmen yang besar dari Pemerintah maka dibentuklah Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang diketuai langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan beranggotakan juga Gubernur Bank Indonesia

dan Ketua Dewan Komisiner Otorita Jasa Keuangan untuk menjamin terbangunnya sinergi dan koordinasi yang baik dalam setiap upaya peningkatan inklusi keuangan masyarakat.

Dalam Strategi ini terdapat lima pilar utama dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, yaitu:

1. Edukasi Keuangan
2. Hak Property Masyarakat (sertifikasi tanah rakyat)
3. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan (*Financial Technology* atau *Fintech* akan banyak berperan)
4. Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah
5. Perlindungan Konsumen.

Dalam melaksanakan program-program tersebut dibutuhkan sinergi dan dukungan dari seluruh *stakeholders*, baik Pemerintah, Otoritas terkait dan juga industri jasa keuangan.

Melalui penyempurnaan SNKI ini, diharapkan pada akhir tahun 2019 tingkat inklusi keuangan Indonesia dapat naik menjadi 75% dari yang sebelumnya hanya 36% di akhir tahun 2014.

### **Bapak Ibu hadirin dan para lulusan yang berbahagia,**

Sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK memiliki 2 amanat penting (2 pilar utama) yaitu (a) Melakukan pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dan (b) Melakukan Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Dengan amanat tersebut, menjadikan OJK memiliki peran yang strategis terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat, terutama pada pilar pertama "Edukasi Keuangan", pilar ketiga "Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan" dan pilar kelima "Perlindungan Konsumen".

Beberapa kebijakan / inisiatif Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka membuka akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan menurunkan ketimpangan, diantaranya adalah:

1. Peluncuran Program LAKU PANDAI / Branchless Banking  
Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, jasa keuangan dapat berada di tengah tengah masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil tanpa harus menghadirkan kantor cabang bank secara fisik.
2. Peluncuran Layanan Keuangan Mikro  
Layanan keuangan mikro merupakan layanan produk dan jasa keuangan dari berbagai industri jasa keuangan yang bersifat low cost atau terjangkau oleh masyarakat golongan menengah ke bawah. Contohnya: tabunganku, asuransi mikro, kredit mikro, cicilan emas dan reksadana mikro.
3. Peluncuran Program Jangkau, Sinergi dan Guideline (JARING)  
Program JARING ini di gagas untuk peningkatan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan yang terus bertumbuh serta mendorong perluasan akses masyarakat terhadap sektor jasa keuangan melalui peningkatan pemahaman pelaku jasa keuangan (SJK) terhadap bisnis sektor Kelautan dan Perikanan yang lebih baik dan kolaborasi antara kementerian dan industri jasa keuangan.
4. Materi Literasi Keuangan dalam Kurikulum SD, SMP dan SMA  
Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan OJK telah memasukkan informasi mengenai bank, asuransi dan pasar modal di kurikulum sekolah, baik SD, SMP maupun SMA.
5. Program Outreach dan ToT Edukasi Keuangan Masyarakat  
Secara terus menerus OJK melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat.
6. Program Simpanan Pelajar  
Menggerakkan generasi muda untuk mengenal produk perbankan lebih dini dan menumbuhkan budaya manabung.
7. Pasar Keuangan Rakyat, Pasar Rakyat Syariah/Syariah Vaganza  
PKR ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang produk dan layanan keuangan serta untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat.